

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERSEPSI WAJIB PAJAK MENGENAI PENGELAPAN PAJAK

(Studi Empiris pada Wajib Pajak Pribadi di Kota Semarang)



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Diponegoro

disusun oleh:

ANNISA'UL HANDYANI MUKHAROROH
NIM. 12030110120015

FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2014

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Annisa'ul Handyani Mukharoroh
Nomor Induk Mahasiswa : 12030110120015
Fakultas/ Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/ Akuntansi
Judul Skripsi : ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG
MEMPENGARUHI PERSEPSI WAJIB
PAJAK MENGENAI ETIKA
PENGGELAPAN PAJAK
Dosen Pembimbing : Nur Cahyonowati, SE, M.Si, Akt

Semarang, 29 April 2014

Dosen Pembimbing,



Nur Cahyonowati, SE, M.Si, Akt

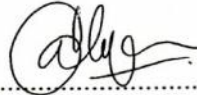
NIP. 19810813 200801 2007

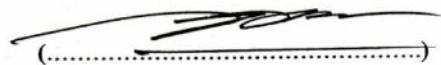
PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN


Nama Mahasiswa : Annisa'ul Handyani Mukharoroh
Nomor Induk Mahasiswa : 12030110120015
Fakultas/ Jurusan : Ekonomi/ Akuntansi
Judul Skripsi : ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG
MEMPENGARUHI PERSEPSI WAJIB
PAJAK MENGENAI PENGELAPAN
PAJAK

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 21 MEI.....2014

Tim Penguji

1. Nur Cahyonowati, SE, M.Si, Akt (.....)

2. Dr. Darsono, SE, MBA, Akt (.....)

3. Dr. H. Agus Purwanto, M.Si, Akt (.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini saya, Annisa'ul Handyani Mukharoroh, menyatakan bahwa skripsi dengan judul : Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak mengenai Penggelapan pajak, adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhanatau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau symbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penluis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/ atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin itu, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi saya yang saya ajukan sebagai tulisan saya sendiri. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 30 April 2014

Yang membuat pertanyaan,

Annisa'ul Handyani Mukharoroh

NIM. 12030110120015

ABSTRACT

This research aims to analyze the factors that influence the perception of taxpayers regarding of tax evasion. The independent variable in this research are justice, taxation system, norm, obedience, and discrimination, while its dependent variable of tax evasion. The population in this research was an individual taxpayer listed in Semarang City and the sample in this study used Slovin formula, so that it obtained 400 respondents as samples. In this research, there were 297 respondents that had been analyzed as samples. This analysis used multiple regression analysis. These results indicate that there are several factors that affect the taxpayer's perception regarding of tax evasion, namely justice, taxation system, and obedience.

Keywords: justice, taxation system, norm, obedience, discrimination, tax evasion.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. variabel independen dalam penelitian ini adalah keadilan, sistem perpajakan, norma, kepatuhan, dan diskriminasi sedangkan variabel dependennya adalah penggelapan pajak. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di kota semarang dan sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus Slovin, sehingga didapat jumlah sampelnya adalah 400 responden. Dalam penelitian ini sampel yang dapat dianalisis adalah 297 responden. Pengujian ini menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak, yaitu keadilan, sistem perpajakan, dan kepatuhan.

Kata kunci : keadilan, sistem perpajakan, norma, kepatuhan, diskriminasi, penggelapan pajak.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Untuk setiap hinaan yang kau sabari, ada setidaknya satu kebaikan yang ditambahkan didalam hidupmu”.

Mario Teguh

“Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah memberikan jalan keluar kepadanya dan member rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Barang siapa yang bertakwa pada Allah, maka Allah jadikan urusannya menjadi mudah. Barang siapa bertakwa kepada Allah akan dihapuskan dosa-dosanya dan mendapatkan pahala yang agung” (Q.S Ath-Thalaq : 2,3,4)

Dengan rasa penuh syukur, kupersembahkan kepada :

Ibu dan Bapak tersayang

Adik-adikku tercinta

Sahabat dan teman-temanku yang selalu setia memberikan semangat

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT. Yang telah memberikan saya ilmu dan kesabaran dalam mengerjakan skripsi saya. Alhamdulillah, atas rahmat-Nya saya bisa menyelesaikan skripsi saya yang berjudul “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak mengenai Penggelapan pajak”.

Skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik, karena adanya bimbingan, dukungan, bantuan, dan do’a dari berbagai pihak. Oleh karena itu, ucapan terima kasih saya persembahkan untuk :

1. Bapak Prof. Drs. H. Mohammad Nasir, M.Si., Ph.D., Akt. selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
2. Bapak Prof. Dr. Muchamad Syafruddin, M.Si., Akt. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
3. Dosen pembimbing skripsi, Ibu Nur Cahyonowati, SE, M.Si., Akt. yang telah membimbing dan membantu memberikan masukan yang bermanfaat sehingga skripsi ini dapat tersusun.
4. Bapak H. Tarmizi Achmad, MBA., Ph.D., Akt selaku Dosen Wali.
5. Bapak dan Ibu dosen dan seluruh staf pengajar Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro yang telah memberikan ilmunya tanpa pamrih.
6. Keluarga tercinta, Bapak Ansor dan Ibu Hidayatul Faizaliah serta adik-adik yang selalu memberi saya semangat agar bisa menyelesaikan skripsi ini.
7. Sahabat-sahabat ku tercinta, Putri Heriani, Syinthia Fawaati, Firdha Yulianti, Sri Eny Suharini, Pingkan Mayosi, Gera Rozalia, febri

Nurchayono, Intan Dwi Yuliarti, serta teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

8. Teman-teman KKN Tim 2 kecamatan Ngablak, kabupaten Magelang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini sangat jauh dari sempurna. Namun diharapkan skripsi ini dapat membantu akademisi sebagai bahan dari penelitian selanjutnya.

Semarang, 30 April 2014

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN SKRIPSI.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
<i>ABSTRACT</i>	v
ABSTRAK	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.5 Sistematika Penulisan	10
BAB II TELAAH PUSTAKA	11
2.1 Landasan Teori	11
2.1.1 Teori Atribusi	11
2.1.2 Keadilan	13
2.1.3 Sistem Perpajakan	14

2.1.4	Norma.....	17
2.1.5	Kepatuhan	20
2.1.6	Diskriminasi	22
2.1.7	Wajib Pajak	23
2.1.8	Penggelapan Pajak	25
2.1.9	Penelitian Terdahulu	26
2.2	Kerangka Pemikiran.....	29
2.3	Hipotesis.....	30
2.3.1	Keadilan berpengaruh terhadap Persepsi Wajib Pajak mengenai Penggelapan pajak	30
2.3.2	Sistem Perpajakan berpengaruh terhadap Persepsi Wajib Pajak mengenai Penggelapan pajak	31
2.3.3	Norma berpengaruh terhadap Persepsi Wajib Pajak mengenai Penggelapan pajak	32
2.3.4	Kepatuhan berpengaruh terhadap Persepsi Wajib Pajak mengenai Penggelapan pajak	33
2.3.5	Diskriminasi berpengaruh terhadap Persepsi Wajib Pajak mengenai Penggelapan pajak	34
BAB III	METODE PENELITIAN	36
3.1	Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel	36
3.1.1	Keadilan	36
3.1.2	Sistem Perpajakan	37

3.1.3	Norma.....	38
3.1.4	Kepatuhan	38
3.1.5	Diskriminasi	39
3.1.6	Penggelapan pajak.....	40
3.2	Populasi dan Sampel	41
3.3	Jenis dan Sumber Data	42
3.4	Metode Pengumpulan Data	42
3.5	Metode Analisis	42
3.5.1	Statistik Deskriptif	43
3.5.2	Uji Validitas dan Reliabilitas	43
3.5.3	Uji Asumsi Klasik	45
3.5.4	Model Regresi	51
3.5.5	Pengujian Hipotesis.....	52
BAB IV	HASIL DAN ANALISIS.....	57
4.1	Deskripsi Objek penelitian.....	57
4.2	Analisis Hasil Kuesioner.....	62
4.3	Analisis Uji Statistik	68
4.3.1	Analisis Deskriptif	68
4.3.2	Uji Validitas dan Reliabilitas	69
4.3.3	Uji Asumsi Klasik	72
4.3.4	Uji Regresi Berganda	76
4.4	Interprestasi Hasil.....	79

BAB V	PENUTUP.....	83
5.1	Kesimpulan	83
5.2	Keterbatasan.....	85
5.3	Saran.....	85
	DAFTAR PUSTAKA	86
	LAMPIRAN.....	89

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	28
Tabel 4.1 Hasil Penyebaran Kuesioner	57
Tabel 4.2 Distribusi Responden Menurut Kelompok Umur	58
Tabel 4.3 Distribusi Responden Menurut Jenis Kelamin.....	59
Tabel 4.4 Distribusi responden Menurut Pendidikan.....	60
Tabel 4.5 Distribusi Responden Menurut Pekerjaan.....	60
Tabel 4.6 Distribusi Responden Menurut Agama.....	61
Tabel 4.7 Distribusi Responden Menurut Pendapatan	62
Tabel 4.8 Jawaban Responden Terhadap Variabel keadilan.....	63
Tabel 4.9 Jawaban Responden Terhadap Variabel Sistem Perpajakan.....	64
Tabel 4.10 Jawaban Responden Terhadap Variabel Norma	65
Tabel 4.11 Jawaban Responden Terhadap Variabel Kepatuhan	66
Tabel 4.12 Jawaban Responden Terhadap Variabel Diskriminasi.....	67
Tabel 4.13 Hasil Statistik Deskriptif.....	68
Tabel 4.14 Hasil Uji Reliabilitas	70
Tabel 4.15 Hasil Uji Validitas.....	71
Tabel 4.16 Hasil Uji Normalitas	73
Tabel 4.17 Hasil Uji Multikolinieritas	75
Tabel 4.18 Hasil Uji Heteroskedastisitas	76
Tabel 4.19 Hasil Koefisien Determinasi	77
Tabel 4.20 Hasil Uji F.....	78
Tabel 4.21 Hasil Uji t.....	78

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	30
Gambar 4.1 Hasil Uji Normalitas.....	74

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN A Data Kuesioner	89
LAMPIRAN B Data Responden	95
LAMPIRAN C Tabulasi Data	103
LAMPIRAN D Hasil Output Statistik	115

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara berkembang, dan salah satu pendapatannya adalah Pajak. Tidak dapat dipungkiri bahwa pajak merupakan salah satu komponen penting dalam pembangunan di Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana telah Beberapa kali diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 Pasal 1, ayat 1 menyatakan bahwa “pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Untuk itu, sebagai warga Negara Indonesia tentunya dapat membayar pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penerimaan pajak dari tahun ke tahun semakin meningkat, seperti terlihat pada Tabel 1.1, yaitu tentang data penerimaan pajak dalam negeri Indonesia yang berisi data penerimaan pajak dalam negeri yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2009-2012 yang dipost tanggal 20 Maret 2012.

Penerimaan Pajak Dalam Negeri 2009-2012

(dalam milliar rupiah)

JENIS PAJAK	TAHUN			
	2009	2010	2011	2012
PPh MIGAS	50,043.70	58,872.70	65,230.70	58,665.80
PPh NON MIGAS	267,571.30	298,172.80	366,746.30	454,168.70
PPN DAN PPnBM	193,067.50	230,604.90	298,441.40	350,342.20
PBB	24,270.20	28,580.60	29,057.80	35,646.90
BPHTB	6,464.50	8,026.40		
CUKAI	56,718.50	66,165.90	68,075.30	72,443.10
PAJAK LAINNYA	3,116.00	3,968.80	4,193.80	5,632.00
	601,251.70	694,392.10	831,745.30	976,898.70

Sumber: www.pajak.go.id (Direktorat Jenderal Anggaran)

Pada Tabel 1.1 terlihat bahwa penerimaan pajak terdiri dari PPh Migas, PPh Non Migas, dan lain-lain. PPh Migas adalah pajak penghasilan yang berasal dari perusahaan minyak bumi dan gas alam, sedangkan PPh Non migas adalah pajak penghasilan selain dari yang disebutkan diatas

seperti, PPh 21, PPh 22, PPh 23, PPh 25/ 29, PPh 4 ayat 2. Dari tahun ke tahun penerimaan yang paling besar dihasilkan oleh PPh Non Migas dan meningkat setiap tahunnya. Hingga saat ini, pendapatan terbesar dihasilkan dari penerimaan pajak dari jenis pajak Non Migas. Pada tahun 2010 peningkatan yang terjadi tidak terlalu signifikan, mengingat pada tahun tersebut masih banyak yang belum menyadari akan kesadaran membayar pajak. Untuk itu, meskipun penerimaan pajak dari tahun ke tahun semakin meningkat, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa akan terjadi penurunan yang disebabkan oleh penggelapan pajak yang dilakukan.

Selain itu, sistem pemungutan pajak adalah salah satu di antara elemen yang penting agar dapat menunjang keberhasilan penerimaan pajak suatu Negara. Dalam sejarah perkembangan pajak, pemungutan pajak di Indonesia dapat dibagi dalam 2 periode, yaitu periode sebelum tahun 1984 dan periode tahun 1984 sampai sekarang. Pembagian tersebut berdasarkan pada perundang-undangan perpajakan yang mengacu pada lahirnya undang-undang setelah kemerdekaan (Waluyo ed.2, 2009). Terdapat tiga sistem pemungutan pajak yaitu, *official assessment system*, *self assessment system*, dan *with holding system*. Oleh karena penerimaan pajak akan ditingkatkan, maka sejak reformasi tahun 1984 Pemerintah Negara Indonesia mulai menerapkan *self assessment system*. Dalam sistem ini wajib pajak akan diberikan kemudahan dalam menetapkan pajaknya, yaitu dengan menghitung, membayar, dan melaporkannya sendiri, sedangkan fiskus pajak

berperan sebagai pembimbing, dan pengawas pelaksanaan kewajiban yang dilakukan oleh wajib pajak baik itu pribadi maupun badan.

Fakta menunjukkan bahwa sebagian besar wajib pajak masih enggan membayar pajak dengan benar, mereka akan selalu berusaha untuk mengelak dari pembayaran pajak berdasarkan data hasil olahan - Direktorat Jenderal Pajak (PMK 16/PMK.03/2013 Makin Menenguhkan DJP). Oleh sebab itu, dalam *self assessment system* ini transparansi data perpajakan yang dibuat oleh wajib pajak harus lengkap dan akurat karena sangat penting bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Data-data tersebut dipergunakan untuk membuktikan bahwa perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak sudah benar dan tepat. Apabila diketahui terdapat kesalahan, maka data tersebut akan digunakan sebagai dasar tindakan koreksi yang disampaikan oleh fiskus pajak (www.pajak.go.id) pada tanggal 9 April 2013.

Penggelapan pajak terjadi saat pemerintah menetapkan bahwa wajib pajak harus membayar pajak. Penggelapan pajak terjadi dikarenakan pandangan mereka terhadap pajak yang berbeda dengan pandangan pemerintah. Perbedaan ini terjadi karena minimnya informasi mengenai pengeluaran pemerintah terhadap penerimaan pajak yang didapat setiap tahunnya. Tidak adanya kejelasan yang pasti tentang uang yang mereka bayarkan setiap bulannya serta penggunaan uang tersebut, itu semua menurut mereka tidak ada transparansi dari penerimaan pajak tersebut.

Untuk menjadi warga Negara yang baik, salah satu yang harus dilakukan masyarakat adalah dengan menjadi wajib pajak. Wajib pajak adalah warga Negara Indonesia yang mempunyai NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), dan setiap wajib pajak mempunyai kewajiban sendiri dalam menghitung, menyetorkan dan melaporkan pajaknya. Kesadaran akan membayar pajak juga merupakan etika dari wajib pajak. Sadar dan mengetahui akan pentingnya membayar pajak bagi Negara, membuat mereka sadar untuk membayar pajak. Disamping itu, juga terdapat wajib pajak yang memiliki etika kurang baik terhadap kesadaran pajak. Seperti halnya penggelapan pajak, kita bisa lihat beberapa kasus penggelapan pajak terjadi di Indonesia, seperti kasus korupsi Gayus Tambunan yang mempunyai etika tidak baik dalam dunia perpajakan.

Penggelapan pajak terjadi bukan hanya dari segi pengetahuan seseorang yang kurang mengerti pajak, tetapi juga faktor –faktor lain seperti norma. Norma merupakan pedoman bagi masyarakat untuk melakukan sesuatu tindakan. Seperti halnya penggelapan pajak, tentunya seseorang akan berfikir lebih untuk melakukan penggelapan pajak, tergantung dari pandangan masyarakat tersebut.

Menurut Simon (2003) (dikutip dari Gunadi, 2005 dan Harinurdin, 2009) pengertian kepatuhan pajak (*tax compliance*) adalah wajib pajak yang mempunyai kesadaran untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Untuk memenuhi kebutuhan kewajiban perpajakan tersebut harus sesuai dengan

aperaturan yang berlaku tanpa dilakukannya pemeriksaan, investigasi seksama (*obtrusive investigation*), peringatan, ancaman, dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi. Menurut Nurmantu (2007) kepatuhan wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya maka dengan sendirinya akan meningkatkan penerimaan Negara dan pada akhirnya akan meminimalkan risiko penggelapan pajak.

Salah satu hal yang perlu diperhatikan lebih spesifik lagi adalah keadilan. Ini dikarenakan pajak adalah sesuatu yang bersifat memaksa, sehingga masyarakat wajib membayar pajak meskipun tidak mendapatkan imbalan dari pemerintah. Ini juga menjadi permasalahan dalam perpajakan, sebab masyarakat merasa tidak adil dalam pemungutan pajak oleh Negara. Dikarenakan sistem pemungutan pajak di Indonesia menggunakan *self assessment system*, keadilan ini sangat diperlukan agar tidak menimbulkan pertentangan terhadap pajak.

Adanya diskriminasi juga menyebabkan terjadinya penggelapan pajak. Perlakuan diskriminasi sangat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 beserta amandemennya. Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas mengutamakan kesetaraan dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat baik di bidang politik, ekonomi, social budaya, hukum dan bidang kemasyarakatan lainnya.

1.2 Rumusan Masalah

Seperti diketahui, pajak merupakan tiang dari penerimaan Negara. Bila pajak ditiadakan atau dihilangkan, maka penerimaan pajak Negara juga akan berkurang. Penerimaan Negara berkurang bukan hanya karena pajaknya dihilangkan, tetapi juga karena pelanggaran-pelanggaran pajak yang terjadi juga dapat mengurangi penerimaan Negara.

Pajak merupakan suatu beban yang harus dibayarkan oleh wajib pajak baik itu pribadi atau badan. Untuk itu, banyak wajib pajak yang berusaha untuk meminimalkan pajak.

Penghindaran pajak dilakukan dengan meminimalkan beban pajak sesuai dengan peraturan perundangan perpajakan. Sebaliknya, penggelapan pajak dilakukan dengan meminimalkan atau bahkan menghilangkan beban pajak yang terutang, dengan melanggar peraturan perundangan perpajakan.

Di Indonesia, banyak sekali kasus penggelapan pajak, tetapi terkadang penggelapan pajak tidak terungkap oleh hukum. Sehingga banyak yang masih melakukan penggelapan pajak. sistem hukum yang kurang memadai, memicu pergerakan yang signifikan atas penggelapan pajak. dalam penelitian ini, peneliti tertarik untuk membahas faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penggelapan pajak.

Dalam beberapa literature, banyak penelitian yang dilakukan tetapi kebanyakan mengenai kepatuhan pajak, sangat sedikit sekali yang meneliti tentang ketidakpatuhan pajak. Terdapat beberapa penelitian yang meneliti

tentang penggelapan pajak di suatu Negara tertentu, tetapi jarang untuk membahas tentang etika lebih berfokus pada pemerintahannya.

Penelitian yang dilakukan oleh McGee (2004) mengenai studi penggelapan pajak di Armenia (McGee, 1999b) menemukan bahwa terdapat dua alasan utama untuk menghindari pajak yaitu kurangnya mekanisme di tempat pengumpulan pajak dan pandangan masyarakat bahwa pemerintah tidak layak mengambil pendapatan dari para pekerja. Perbedaan penelitian ini adalah dengan menambahkan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi persepsi mengenai penggelapan pajak, dengan mengambil variabel dari penelitian Michael Wenzel (2004) beserta Wahyu Suminarsasi dan Supriadi (2008).

Dari uraian rumusan masalah tersebut diatas, dapat ditarik pertanyaan penelitian dalam penelitian ini :

1. Apakah keadilan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak?
2. Apakah sistem perpajakan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak?
3. Apakah norma berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak?
4. Apakah kepatuhan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak?

5. Apakah diskriminasi berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini, sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis apakah terdapat pengaruh antara keadilan dengan persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.
2. Untuk menganalisis apakah terdapat pengaruh antara sistem perpajakan dengan persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.
3. Untuk menganalisis apakah terdapat pengaruh antara norma dengan persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.
4. Untuk menganalisis apakah terdapat pengaruh antara prespektif kepatuhan dengan persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.
5. Untuk menganalisis apakah terdapat pengaruh antara diskriminasi dengan persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.
6. Untuk menganalisis apakah terdapat pengaruh antara persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian yang dilakukan, sebagai berikut :

1. Bagi akademisi

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi penelitian-penelitian yang selanjutnya. Dan dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.

2. Bagi Pemerintah

Diharapkan pemerintah mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penggelapan pajak, dan menemukan solusi yang tepat agar perpajakan di Indonesia dapat berjalan dengan baik.

1.5 Sistematika Penulisan

Penelitian ini dibagi menjadi 5 bagian dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I Berisi pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II Bab ini menjelaskan tentang landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis.

BAB III Bab ini menjelaskan tentang variable penelitian dan definisi operasional, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis.

BAB IV Bab ini menjelaskan tentang deskripsi objek penelitian, analisis data, dan interpretasi hasil

BAB V Bab ini menjelaskan tentang simpulan, keterbatasan, dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Teori Atribusi (*Atribution Theory*)

Teori ini menggambarkan komunikasi pada seseorang yang berusaha untuk menelaah, menilai dan menyimpulkan penyebab dari suatu kejadian menurut persepsi individu.

Pada dasarnya teori atribusi menurut Robbins (1996) menyatakan bahwa bila seorang individu mengamati perilaku seseorang, maka mereka akan mencoba untuk menentukan apakah perilaku tersebut ditimbulkan secara internal atau eksternal (lihat juga Fikriningrum, 2012). Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang dipengaruhi dari dalam diri individu, sedangkan perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar individu, artinya individu akan berperilaku bukan karena keinginannya sendiri, melainkan karena desakan atau keadaan yang tidak bisa terkontrol.

Penentuan internal atau eksternal menurut Robbins (1996), bergantung pada tiga faktor, yaitu **pertama** kekhususannya, artinya seseorang akan memberikan persepsi perilaku individu lain secara berbeda dalam situasi yang berbeda pula. Apabila perilaku seseorang tersebut dianggap sebagai suatu hal yang tidak biasa dilakukan, maka individu lain yang akan bertindak sebagai pengamat akan memberikan persepsi bahwa orang tersebut melakukan perilaku yang ditimbulkan secara eksternal. Sebaliknya jika perilaku tersebut dianggap sebagai suatu hal yang biasa dilakukan, maka akan dinilai sebagai atribusi secara internal. **Kedua**, konsensus artinya jika semua orang mempunyai kesamaan persepsi dalam merespon perilaku seseorang dalam keadaan yang sama. Apabila konsekuensinya tinggi, maka termasuk atribusi yang ditimbulkan secara internal. Sebaliknya jika konsekuensinya rendah, maka termasuk atribusi yang ditimbulkan secara eksternal. Faktor **terakhir** adalah konsistensi, yaitu jika seseorang menilai perilaku-perilaku orang lain dengan respon atau tanggapan yang sama dari waktu ke waktu. Semakin konsisten perilaku tersebut, maka orang akan menghubungkan perilaku tersebut dengan sebab-sebab internal. Oleh karena itu, teori ini sangat mendukung dalam penelitian ini.

Kepatuhan wajib pajak berhubungan dengan perilaku wajib pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri. Menurut Agus (2006) dalam kondisi internal dan eksternal sangat mempengaruhi persepsi seseorang dalam membuat suatu penilaian mengenai perilaku orang lain (lihat juga Dewi, 2011).

2.1.2. Keadilan

Keadilan merupakan suatu hal yang sulit untuk dianalisis, bagaimana mewujudkan suatu keadilan jika tidak mengetahui apa maksud dari keadilan. Menurut Aristoteles dalam tulisannya *Rhetorica* membedakan keadilan dalam dua macam :

- Keadilan distributif atau *justitia distributiva*

Keadilan distributif adalah suatu keadilan yang diberikan kepada setiap orang yang berdasarkan pada jasa-jasanya atau pembagian menurut haknya masing-masing. Keadilan distributif berperan dalam hubungan antara masyarakat dengan individu.

- Keadilan kumulatif atau *justitia cummulativa*

Keadilan kumulatif adalah suatu keadilan yang diberikan kepada setiap orang tanpa memperdulikan jasanya masing-

masing. Keadilan ini berdasarkan pada transaksi (*sunallagamata*) baik yang sukarela atau tidak. Biasanya terjadi pada lingkungan hukum perdata, misalnya dalam perjanjian tukar-menukar.

Sedangkan keadilan dari sudut pandang bangsa Indonesia disebut juga keadilan sosial, secara jelas dicantumkan dalam pancasila sila ke-2 dan ke-5 serta Undang-Undang Dasar 1945. Dalam konsep pemikiran bangsa Indonesia, keadilan sangat berkaitan erat dengan hak dan kewajiban. Dalam konteks pembangunan bangsa Indonesia, keadilan tidak hanya bersifat sektoral tetapi meliputi ideology, Ekpolesosbudhankam. Untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, baik adil dalam kemakmuran maupun makmur dalam keadilan.

Prinsip keadilan perpajakan berdasarkan pada distribusi pengenaan pajak, sementara untuk memenuhi belanja publik pemerintah harus mempertimbangkan antara kekayaan dan pendapatan masyarakat. Prinsip keadilan pajak juga dapat dilihat dari sisi yakni penerimaan dan pengeluaran. Distribusi pembebanan pajak yang adil dipengaruhi oleh faktor-faktor yaitu, siapa yang membayar, jenis pendapatannya serta tarif pajak. Hal ini juga dipengaruhi oleh metode *assessment system* dan ketepatan atau

keakuratan perhitungan pajak yang terutang. Ketidakakuratan perhitungan mengakibatkan terjadinya ketidakadilan karena adanya pajak yang lebih atau kurang bayar.

2.1.3. Sistem Perpajakan

Menurut McGee (2009) (dikutip dari Suminarsasi dan Supriadi, 2010) sistem perpajakan dan tarif pajak berkaitan dengan terjadinya korupsi dalam bentuk apapun. Jadi gambaran umum mengenai sistem pajak adalah tentang tinggi rendahnya tarif pajak dan pertanggungjawaban iuran pajak. pertanggungjawaban yang dimaksud adalah iuran pajak tersebut digunakan untuk pengeluaran umum Negara, atau justru dikorupsi oleh pemerintah maupun oleh para petugas pajak.

Untuk mencapai tujuan pemungutan pajak diperlukan asas-asas pemungutan pajak dalam pemilihan alternatif pemungutannya, sehingga terdapat keselarasan pemungutan pajak dengan tujuan dan asas yang masih diperlukan lagi yaitu pemahaman atas perlakuan pajak tertentu. Asas-asas pemungutan pajak sebagaimana dikemukakan oleh Adam Smith dalam buku *An inquiry the Nature and Cause of the Wealth of Nations* menyatakan bahwa pemungutan pajak harusnya berdasarkan pada asas-asas berikut :

1. *Equality*

Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak yang dikenakan kepada orang pribadi harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak wajib pajak (*ability to pay*) dan sesuai dengan manfaat yang akan diterima. Adil yang dimaksud adalah bahwa setiap Wajib Pajak yang menyetorkan uangnya untuk pengeluaran pemerintah setara dengan kepentingannya dan manfaat yang didapat.

2. *Certainty*

Penetapan pajak itu tidak ditentukan secara sewenang-wenang, harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Oleh karena itu, Wajib Pajak harus mengetahui dengan jelas dan pasti berapakah besarnya pajak yang terutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran.

3. *Convenience*

Kapan wajib pajak itu harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan situasi dimana wajib pajak tidak merasa terbebani, melainkan sebagai tanggung jawab.

4. *Economy*

Secara ekonomi biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi wajib pajak diharapkan dapat seminimal mungkin, demikian pula beban yang ditanggung wajib pajak.

Sistem perpajakan adalah suatu metode bagaimana mengelola utang pajak yang terutang oleh wajib pajak agar dapat mengalir ke kas Negara. Menurut Waluyo (Ed.10, 2011) dalam bukunya Perpajakan Indonesia terdapat tiga sistem pemungutan pajak, yaitu :

1. *Official assessment system*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi kekuasaan kepada pemerintah atau aparat pajak untuk menentukan besar kecilnya pajak yang terutang. Terdapat ciri-ciri *official assessment system* adalah sebagai berikut :

1. Kekuasaan untuk menentukan besar kecilnya pajak terutang berada pada aparat pajak.
2. Wajib pajak bersifat pasif
3. Utang pajak terjadi setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2. *Self assessment system*

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberikan kekuasaan, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang.

3. *With holding system.*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan kekuasaan kepada pihak ketiga (biasanya menggunakan jasa konsultan) untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

2.1.4. Norma

Semua kelompok telah menetapkan norma (*norm*), sebagai suatu standar yang dapat diterima atas perilaku yang dianut bersama oleh anggota kelompok. Norma menyampaikan apa yang seharusnya dilakukan dan tidak dilakukan dalam keadaan tertentu. Dari sudut pandang individu, norma tersebut memberikan apa yang seharusnya diharapkan dari diri sendiri dalam keadaan tertentu. Norma akan berlaku ketika sudah mendapat persetujuan dari kelompok tersebut, yaitu untuk mempengaruhi perilaku dari anggota kelompok dengan pengendalian secara eksternal yang minim.

Norma didefinisikan sebagai aturan yang berisi pedoman terhadap tingkah laku yang boleh atau tidak boleh dilakukan manusia dan bersifat mengikat. Hal ini berarti bahwa manusia wajib menaati norma yang ada. Dalam arti luas, norma adalah sebagai suatu ketentuan untuk mengatur kehidupan dan hubungan antar sesama manusia. Norma merupakan petunjuk hidup bagi manusia

dan pedoman perilaku seseorang yang berlaku di masyarakat. Norma terbagi dalam beberapa jenis, yaitu :

1. Norma Agama

Norma agama diartikan sebagai peraturan hidup yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk menciptakan kehidupan yang bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Setiap agama memiliki kitab suci yang dijadikan pedoman hidup. Dalam setiap ajaran agama memiliki larangan untuk berbuat yang tidak baik, maka jika melanggar akan mendapatkan balasan dari Tuhan baik itu di dunia maupun di akhirat. Sebaliknya, jika mengerjakan sesuatu yang baik maka akan mendapatkan pahala.

2. Norma kesusilaan

Norma kesusilaan yaitu suatu peraturan hidup yang dianggap sebagai suara hati sanubari manusia, dan juga merupakan aturan hidup mengenai perilaku baik dan buruk. Jika melanggar norma ini akan mendapatkan sanksi social, seperti cibiran atau cemoohan masyarakat sampai dengan diasingkan dari lingkungan masyarakat.

3. Norma kesopanan

Norma kesopanan yaitu peraturan hidup yang diatur oleh agama maupun adat istiadat masyarakat. Norma kesopanan

merupakan pedoman yang mengatur tingkah laku manusia terhadap manusia yang disekitarnya. Norma ini menganut pada budaya masyarakat sekitar. Pelanggaran pada norma ini tidak menimbulkan efek social yang besar.

4. Norma hukum

Norma hukum yaitu peraturan hidup yang dibuat oleh kepala Negara atau kepala suku adat tertentu. Norma hukum yang dimaksud adalah mengenai aturan-aturan yang bersumber dari lembaga yang berwenang (kepala suku adat) serta bersifat memaksa dan mengikat.

2.1.5. Kepatuhan

Menurut Simon (2003) (dikutip dari Gunadi, 2005 dan Harinurdin, 2009) pengertian kepatuhan pajak (*tax compliance*) adalah wajib pajak yang mempunyai kesadaran untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Untuk memenuhi kebutuhan kewajiban perpajakan tersebut harus sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa dilakukannya pemeriksaan, investigasi seksama (*obtrusive investigation*), peringatan, ancaman, dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi.

Kepatuhan yang dikatakan oleh Norman D. Nowak merupakan “suatu iklim” kepatuhan dan kesadaran untuk memenuhi kewajiban perpajakan yang terlihat dalam keadaan (dikutip dari Devano, 2006 Supadmi, 2010) (lihat juga Arum, 2012) sebagai berikut:

- a. Wajib pajak mengerti atau berusaha untuk memahami tentang semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- b. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.
- c. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar dan tepat.
- d. Membayar pajak yang terutang tepat waktu.

Menurut Nurmantu (2007) kepatuhan wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya maka dengan sendirinya akan meningkatkan penerimaan Negara dan pada akhirnya akan meminimalkan risiko penggelapan pajak (lihat juga Harinurdin, 2009). Menurut Keputusan Menteri Keuangan No.235/KMK.03/2003 Tanggal 3 Juni 2003 Wajib Pajak dapat ditetapkan sebagai Wajib Pajak patuh yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak apabila memenuhi semua syarat sebagai berikut :

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT Tahunan dalam dua tahun terakhir.

- b. Dalam tahun terakhir penyampaian SPT Masa yang terlambat tidak lebih dari tiga hari masa pajak untuk setiap jenis pajak berikutnya.
- c. SPT Masa yang terlambat itu disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa pajak berikutnya.
- d. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak :
 - Kecuali telah memperoleh izin untuk mengansur atau menunda pembayaran pajak
 - Tidak termasuk tunggakan pajak suhubungan dengan STP yang diterbitkan untuk dua masa pajak terakhir.
- e. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu sepuluh tahun, dan
- f. Dalam hal laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan harus dengan pendapat wajar dengan pengecualian sepanjang pengecualian tersebut tidak dipengaruhi laba rugi fiskal.
Laporan audit harus :
 - 1. Disusun dalam bentuk panjang (*long form report*)

2. Menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiskal.

2.1.6. Diskriminasi

Diskriminasi berasal dari kata *discrimantation* yang berarti “perbedaan perlakuan”. Menurut kamus bahasa Indonesia karangan Suharto dan Tata, diskriminasi adalah perbedaan perlakuan kepada sesama warga Negara (berdasarkan warna kulit, agama, dsb).

Diskriminasi pada dasarnya adalah penolakan atas HAM dan kebebasan dalam bertindak. Dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang No. 39/1998 tentang HAM disebutkan pengertian diskriminasi adalah “setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status social, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan HAM dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, social, budaya, dan aspek kehidupan sosial lainnya”.

Pengertian tersebut menjelaskan bahwa diskriminasi dapat terjadi dalam berbagai bentuk pada setiap kondisi dan situasi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Diskriminasi juga

berpengaruh pada nilai-nilai budaya, ajaran agama, serta struktur social dan ekonomi yang membenarkan terjadinya diskriminasi.

2.1.7. Wajib Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 2, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Berdasarkan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-89/PJ/2009 ditegaskan bahwa agar tidak menimbulkan berbagai penafsiran yang dapat menyulitkan administrasi pajak hanya mengenal istilah-istilah wajib pajak efektif dan wajib pajak non efektif dengan pengertian sebagai berikut :

1. Wajib Pajak Efektif adalah wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya berupa memenuhi kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa dan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan sebagaimana mestinya.
2. Wajib pajak non efektif adalah wajib pajak yang tidak melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya baik berupa pembayaran maupun penyampaian SPT Masa atau SPT

Tahunan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan yang nantinya dapat diaktifkan kembali. Sebagaimana telah ditegaskan dalam surat edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-89/PJ/2009, wajib pajak non aktif adalah sebagai berikut :

- a. Selama tiga tahun berturut-turut tidak pernah melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan baik berupa pembayaran pajak maupun penyampaian SPT Masa atau SPT Tahunan.
- b. Wajib pajak yang sudah meninggal dunia/ bubar tetapi belum ada surat keterangan resminya.
- c. Tidak diketahui atau ditemukan lagi alamatnya.
- d. Wajib pajak secara nyata tidak menunjukkan kegiatan usahanya.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, maka dapat disimpulkan wajib pajak yang efektif adalah wajib pajak yang dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dengan melakukan penyampaian SPT Masa atau SPT Tahunan. Sedangkan Wajib pajak non efektif adalah wajib pajak yang tidak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dengan tidak melakukannya kewajiban dalam menyampaikan SPT Masa atau SPT Tahunan tersebut.

2.1.8. Penggelapan Pajak

Pelanggaran pajak dilakukan untuk menghindari pembayaran pajak yang terutang. Penggelapan pajak terjadi karena lemahnya hukum di Indonesia, sehingga tidak ada efek jera terhadap kejahatan yang dilakukan. Biasanya karena tarif pajak yang terlalu tinggi yang membuat wajib pajak melakukan tindak pidana penggelapan pajak.

Penggelapan pajak merupakan suatu tindak pidana yang melanggar hukum perpajakan di Indonesia. Karena wajib pajak berusaha untuk meminimalkan pajak yang terutang dengan cara yang ilegal. Penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah perbuatan melanggar Undang-Undang Perpajakan, misalnya wajib pajak melakukan penyampaian SPT dengan jumlah penghasilan yang lebih rendah daripada yang sebenarnya (*understatement of income*) di satu pihak atau melaporkan biaya yang lebih besar daripada yang sebenarnya (*overstatement of the deductions*) di lain pihak. Bentuk *tax evasion* yang lebih parah adalah apabila Wajib Pajak (WP) sama sekali tidak melaporkan penghasilannya (*non-reporting of income*). Adanya perlakuan *tax evasion* dipengaruhi oleh berbagai hal seperti tarif pajak terlalu tinggi, kurang informasi fiskus kepada Wajib Pajak tentang hak dan kewajibannya dalam membayar pajak, kurangnya ketegasan pemerintah dalam menanggapi kecurangan dalam pembayaran pajak sehingga Wajib Pajak mempunyai peluang untuk melakukan *tax evasion*.

2.1.9. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang dapat digunakan sebagai referensi pada penelitian ini. Robert W. McGee dan Sheldon R. Smith melakukan penelitian mengenai the ethics of tax evasion : an empirical study of Utah opinion. Dalam penelitian yang dilakukannya bertujuan untuk menentukan kekuatan dari berbagai argumen yang digunakan dalam membenarkan penggelapan pajak selama 500 tahun terakhir dengan membandingkan persepsi wajib pajak wanita dan pria. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa tujuan yang diinginkan peneliti tercapai. Beberapa argumen utama dijadikan acuan untuk membenarkan penggelapan pajak pada beberapa abad terakhir.

Michael Wenzel (2004) melakukan penelitian mengenai motivation or rationalitation? causal relations between ethics, norms, tax compliance. Michael Wenzel ini menggunakan analisis data yaitu dengan menggunakan teknik *multiple regression analysis* (analisis regresi berganda), yaitu teknik untuk menentukan korelasi antara dua atau lebih variable bebas (independent) dengan variable terikat (dependent). Dalam penelitian ini variable bebas yang digunakan adalah etika, norma, dan kepatuhan pajak, sedangkan variable terikat yang digunakan motivasi dan rasionalisasi. Terdapat hasil dari penelitian yang dilakukan yakni, di Australia terdapat tiga dimensi

atau variable yang mempunyai korelasi yang signifikan terhadap motivasi dan rasionalisasi, yaitu etika, norma, dan kepatuhan pajak. Dalam penelitian ini terdapat 3 (tiga) variable yang diambil dari penelitian yang dilakukan Michael Wenzel yaitu etika, norma, kepatuhan pajak. Variable ini kemungkinan dapat menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak.

Penelitian selanjutnya, dilakukan oleh Wahyu Suminarsasi dan Supriadi (2010) yang melakukan penelitian mengenai pengaruh keadilan, sistem perpajakan, dan diskriminasi terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*). Penelitian ini menggunakan analisis data dengan menggunakan teknik analisis berganda. Variable bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi, sedangkan variable terikat yang digunakan adalah persepsi etis wajib pajak. Dari penelitian yang dilakukan terdapat hasil analisis dari penelitian yang menyebutkan bahwa terdapat dua dimensi yang mempunyai hubungan yang signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak yaitu, sistem perpajakan, diskriminasi. Dalam penelitian ini, sangat relevansi terhadap penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Suminarsasi dan Supriadi. Hal ini relevan karena

meneliti tentang persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak, yang dalam hal ini diambil sebagai variable dependen oleh peneliti.

Tabel 2.1

Ringkasan Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti (Tahun)	Variabel	Metode Analisis	Hasil Penelitian
Michael Wenzel (2004)	Variabel bebas yang digunakan adalah etika, norma, dan kepatuhan pajak.	Analisis Regresi Berganda	Di Australia terdapat tiga dimensi yang mempunyai korelasi yang signifikan terhadap motivasi dan

			rasionalisasi, yaitu etika, moral, dan kepatuhan pajak.
Wahyu Suminarsasi dan Supriadi (2010)	Variable bebas yang digunakan adalah keadilan, sistem perpajakan, dan diskriminasi.	Analisis Regresi Berganda	Terdapat 2 dimensi yang mempunyai hubungan yang signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.

Sumber : Penelitian terdahulu yang diolah

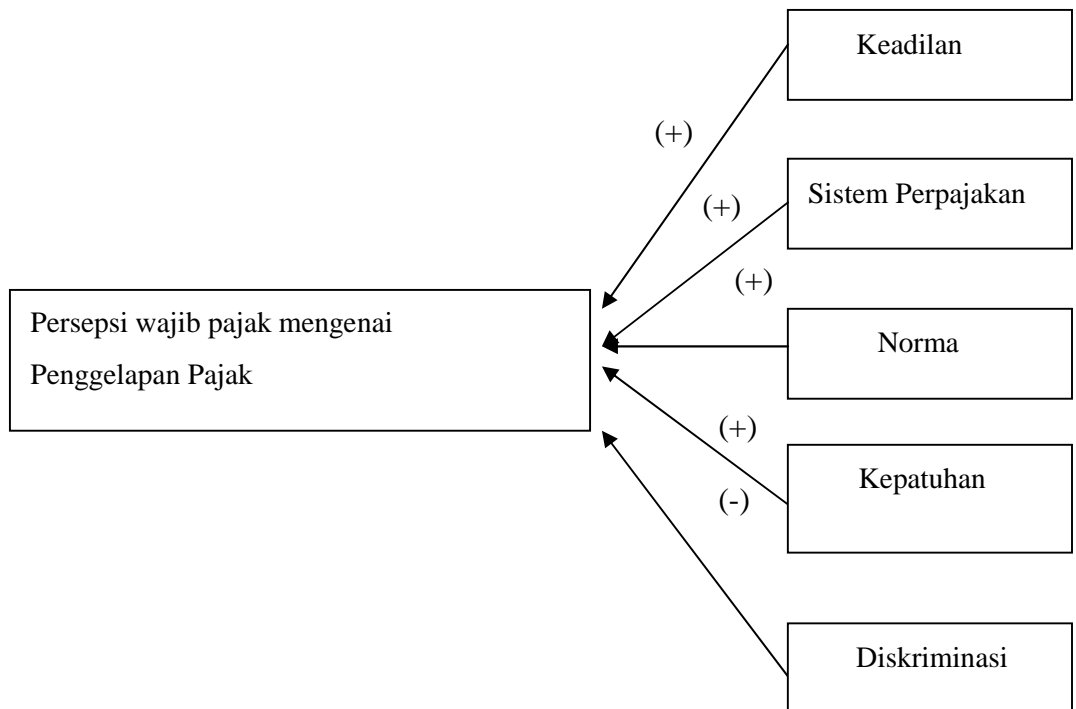
2.2. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah tentang persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. variable yang digunakan dalam

penelitian ini adalah lima variabel independen yaitu, keadilan (X1), sistem perpajakan (X2), norma (X3), kepatuhan (X4), diskriminasi (X5). Sedangkan satu variable dependen yaitu, Persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (Y). berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat di simpulkan sebagai berikut :

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran



2.3. Hipotesis

2.3.1 Pengaruh Keadilan terhadap Persepsi Wajib Pajak mengenai Penggelapan Pajak

Prinsip keadilan perpajakan berdasarkan pada distribusi pengenaan pajak. Keadilan merupakan suatu perilaku yang dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak. Relevansinya dengan teori atribusi adalah bahwa dalam teori atribusi yaitu wajib pajak akan memberikan pandangan terhadap perilaku individu secara berbeda dengan situasi yang berbeda. Oleh karena itu tentunya masyarakat memerlukan suatu kepastian bahwa mereka akan mendapatkan perlakuan adil dalam pengenaan dan pemungutan pajak oleh Negara dalam hal ini yang melakukan adalah aparat pajak. Jika wajib pajak mendapatkan keadilan yang semestinya, maka perilaku penggelapan pajak akan berkurang sehingga penggelapan pajak tidak beretika untuk dilakukan. Sebaliknya, jika wajib pajak mendapatkan keadilan yang minim dan wajib pajak merasa dirugikan, maka bukan tidak mungkin penggelapan yang dilakukan akan semakin tinggi dan beretika untuk dilakukan. Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa, keadilan akan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.

H1 : Keadilan berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak

2.3.2 Pengaruh Sistem Perpajakan terhadap Persepsi Wajib Pajak mengenai Penggelapan Pajak

Pada dasarnya sistem pajak adalah tentang tinggi rendahnya tarif pajak dan pertanggungjawaban iuran pajak. Relevansi sistem perpajakan dengan teori atribusi setiap wajib pajak mempunyai pandangan tersendiri mengenai sistem pajaknya. Jika sistem perpajakan di Indonesia berjalan dengan baik, sehingga kecenderungan wajib pajak melakukan penggelapan pajak dianggap tidak beretika. Sebaliknya, jika sistem perpajakan belum berjalan dengan baik, sehingga kecenderungan wajib pajak melakukan penggelapan pajak akan beretika untuk dilakukan. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa, sistem perpajakan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.

H2 : Sistem Perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak

2.3.3 Pengaruh Norma terhadap Persepsi Wajib Pajak mengenai Penggelapan Pajak

Norma didefinisikan sebagai aturan yang berisi pedoman terhadap tingkah laku yang boleh atau tidak boleh dilakukan manusia dan bersifat mengikat. Hal ini berarti bahwa manusia wajib menaati norma yang ada. Teori atribusi memiliki relevansi terhadap norma, yaitu bila seseorang melakukan hal yang biasa dilakukan maka seseorang tersebut melakukan perilaku secara internal. Sebaliknya, jika seseorang melakukan hal yang tidak biasa dilakukan, maka orang tersebut berperilaku secara eksternal. Dalam penelitian ini, jika seseorang memiliki pedoman yang kuat, maka kecenderungan untuk melakukan penggelapan pajak akan menurun. Sebaliknya, jika seseorang memiliki pedoman yang kurang kuat, penggelapan pajak masih akan terus bertambah. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa, norma berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.

H3 : Norma berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak

2.3.4 Pengaruh Kepatuhan terhadap Persepsi Wajib Pajak mengenai Penggelapan Pajak

Wajib pajak dapat memenuhi kepatuhan perpajakannya secara sukarela (*voluntary of compliance*) yang merupakan inti dari *self assessment system*, dimana wajib pajak bertanggung jawab

menetapkan sendiri kewajiban perpajakannya secara akurat dan tepat waktu dalam membayar dan melaporkan pajaknya (Faidah, 2012). Teori atribusi memiliki hubungan dengan kepatuhan pajak yakni, mengamati perilaku seseorang, apakah perilaku tersebut konsisten dari waktu ke waktu. Jika perilaku seseorang ini baik, maka seseorang ini akan mematuhi peraturan perpajakan yang ada sehingga kecenderungan untuk melakukan penggelapan pajak akan beretika untuk tidak dilakukan. Sebaliknya, jika perilaku seseorang ini tidak baik, maka kecenderungan untuk melanggar peraturan pajak akan semakin besar. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa persepsi kepatuhan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.

H4 : Kepatuhan berpengaruh positif terhadap Persepsi Wajib Pajak mengenai penggelapan pajak

2.3.5 Pengaruh Diskriminasi terhadap Persepsi Wajib Pajak mengenai Penggelapan Pajak

Menurut kamus bahasa Indonesia karangan Suharto dan Tata, diskriminasi adalah pembedaan perlakuan terhadap sesama warga Negara (berdasarkan warna kulit, agama, dsb). Teori atribusi terhadap diskriminasi mempunyai kesamaan yakni pada perilaku yang dilakukan seseorang konsisten dari waktu ke waktu. Jika

terdapat perbedaan pandangan terhadap orang lain, maka kecenderungan untuk melakukan penggelapan pajak akan bertambah sehingga perilaku penggelapan pajak cenderung etis untuk dilakukan. Dan sebaliknya, jika orang tersebut memandang masyarakat Indonesia memiliki keadilan yang sama, maka kecenderungan wajib untuk melakukan penggelapan pajak akan berkurang sehingga perilaku penggelapan pajak cenderung perilaku yang tidak etis untuk dilakukan. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa, diskriminasi berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.

H5 : Diskriminasi berpengaruh negatif terhadap Persepsi Wajib mengenai penggelapan pajak

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional variabel

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan satu variable dependen, dan lima variable independen. Adapun definisi masing-masing variable sebagai berikut :

3.1.1. Keadilan

Keadilan adalah sesuatu yang diberikan kepada siapa saja sesuai dengan haknya, karena keadilan berkaitan dengan hak dan kewajiban seseorang. Seperti halnya, dalam penentuan tarif pajak perlu disesuaikan dengan profesi wajib pajak itu sendiri. Jika terjadi ketidaksesuaian, maka bukan tidak mungkin penggelapan pajak akan meningkat. Tetapi jika yang terjadi sebaliknya, hal ini akan membuat perilaku penggelapan pajak akan berkurang dengan sendirinya.

Keadilan dalam penelitian ini terdapat 5 (lima) indikator yang digunakan sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Dian Anggareni Berutu (2013), serta jenis pernyataan diukur dengan menggunakan skala likert 5 (lima) poin (1 = sangat tidak setuju,...., 5 = sangat setuju).

3.1.2. Sistem Perpajakan

Sistem perpajakan yang dimaksud adalah proses dari awal seseorang mendaftarkan dirinya menjadi wajib pajak sampai wajib pajak tersebut menyampaikan SPT. Perubahan sistem perpajakan dari *official assessment* menjadi *self assessment*, memberikan kepercayaan wajib pajak untuk mendaftar, menghitung, menyetor dan melaporkan kewajiban perpajakannya sendiri. Hal ini menjadikan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak menjadi faktor yang sangat penting untuk mencapai keberhasilan penerimaan pajak (dikutip dari Arum, 2012 dan Dian, 2013). Jika sistem perpajakan belum berjalan dengan baik, maka akan cenderung melakukan penggelapan pajak. Tetapi sebaliknya, jika sistem perpajakan sudah berjalan dengan semestinya, dan kecenderungan untuk melakukan penggelapan akan berkurang sedikit demi sedikit. Dalam mengukur variable ini terdapat 5 (lima) indikator yang digunakan sesuai dengan

thesis yang dilakukan oleh salah satu mahasiswa dari Universitas Bina Nusantara <http://thesis.binus.ac.id/Doc/Lampiran/2011-2-00545-AK%20Lampiran001.pdf>, serta jenis pertanyaan diukur dengan menggunakan skala likert 5 (lima) poin untuk 5 (lima) pertanyaan (1 = sangat tidak setuju,....., 5 = sangat setuju).

3.1.3. Norma

Norma adalah kaidah atau ketentuan yang mengatur kehidupan dan hubungan antar manusia dalam arti luas. Norma merupakan petunjuk hidup bagi manusia dan pedoman perilaku seseorang yang berlaku di masyarakat. Jika perilaku dari wajib pajak memiliki norma atau pedoman yang sesuai dengan keyakinan yang dianut, maka kecenderungan untuk melakukan penggelapan pajak akan berkurang, bahkan tidak ada dalam pikirannya. Tetapi jika sebaliknya, wajib pajak tersebut tidak memiliki pedoman atau norma yang diyakininya, maka kemungkinan untuk melakukan penggelapan pajak akan dilakukannya. Indikator yang digunakan dalam variable ini menggunakan 5 (lima) indikator yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Winda Kurnia Fikriningrum (2012), serta jenis pernyataan diukur dengan menggunakan skala

likert 5 (lima) poin untuk 3 (tiga) pertanyaan (1 = sangat tidak setuju,....., 5 = sangat setuju).

3.1.4. Kepatuhan

Kepatuhan perpajakan adalah wajib pajak yang melaksanakan kewajiban perpajakannya secara sukarela tanpa paksaan. Masalah kepatuhan pajak merupakan masalah yang umum yang dihadapi di hampir semua Negara yang menerapkan sistem perpajakan. Berbagai penelitian telah dilakukan dan kesimpulannya adalah masalah kepatuhan dapat dilihat dari segi keuangan public (*public finance*), penegakan hukum (*law enforcement*), struktur organisasi (*organizational structure*), tenaga kerja (*employees*), etika (*code of conduct*), atau gabungan dari semua segi tersebut (Andreoni *e t al.*1998). Jika etika seseorang ini baik, maka seseorang ini akan mematuhi peraturan perpajakan yang ada. Sebaliknya, jika etika seseorang ini tidak baik, maka kecenderungan untuk melanggar peraturan pajak akan semakin besar. Dalam pengukuran ini terdapat 5 (lima) indikator yang digunakan yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Putut Tri Aryobimo (2012), serta jenis pernyataan ini diukur dengan skala likert 5 (lima) poin untuk 5 (lima) pertanyaan (1 = sangat tidak setuju,...., 5 = sangat setuju).

3.1.5. Diskriminasi

Menurut Theodorson (1979) dalam Danandjaja (2003) yang dikutip kembali oleh Suminarsasi (2010) diskriminasi adalah perlakuan yang tidak seimbang terhadap perorangan atau kelompok berdasarkan ras, suku, agama, atau keanggotaan kelas-kelas sosial. Jika terdapat perbedaan pandangan terhadap orang lain, maka kecenderungan untuk melakukan penggelapan pajak akan bertambah. Dan sebaliknya, jika orang tersebut memandang masyarakat Indonesia memiliki keadilan yang sama, maka kecenderungan wajib untuk melakukan penggelapan pajak akan berkurang. Dalam penelitian ini variable diukur dengan 5 (lima) indikator yang digunakan sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Putut Tri Aryobimo (2012), serta jenis pernyataan yang digunakan menggunakan skala likert 5 (lima) poin untuk 5 (lima) pertanyaan (1= sangat tidak setuju,..., 5= sangat setuju).

3.1.6. Penggelapan Pajak

Penggelapan pajak adalah salah satu cara untuk meminimalkan pajak yang terutang dengan melanggar peraturan perpajakan. Setiap wajib pajak menginginkan tarif pajak yang serendah-rendahnya baik itu di kalangan atas, maupun kalangan menengah. Terkadang cara untuk meminimalkan besarnya pajak yang terutang selalu disalahgunakan, dengan bekerja sama pada pihak-pihak tertentu maka hasilnya sangat merugikan Negara. Penggelapan pajak

biasanya dipengaruhi oleh etika setiap orang yang memiliki NPWP. Sehingga dapat dipahami, apakah wajib pajak tersebut memiliki perilaku yang baik atau bahkan menyimpang.

Dalam penelitian ini variabel diukur dengan 5 (lima) indikator yang disesuaikan dengan penelitian yang dilakukan oleh Robert W. McGee dan Sheldon R. Smith serta jenis pertanyaan menggunakan skala likert 5 (lima) poin untuk 5 (lima) pertanyaan (1= sangat tidak setuju, ..., 5= sangat setuju).

3.2 Populasi dan Sample

Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang memiliki NPWP. Alasan pemilihan wajib pajak orang pribadi yang memiliki NPWP adalah karena persepsi terhadap penggelapan pajak masing-masing berbeda, ada yang menganggap etis dan juga sebaliknya. Alasan pemilihan lokasi di Semarang adalah karena menurut BPS Kota Semarang penerimaan pajak dari tahun ke tahun semakin meningkat, yang berarti banyak masyarakat yang sadar untuk membayar pajak. Ini membuat peneliti memilih lokasi tersebut karena apakah dengan meningkatnya kesadaran untuk membayar pajak, juga diringi dengan kecenderungan masyarakat untuk tidak melakukan penggelapan pajak, meskipun menurut data penerimaan pajak di kota Semarang sudah meningkat.

Pengambilan sample dalam penelitian ini menggunakan teknik *convenience nonprobability sampling* yaitu pengambilan sample menurut kemudahan dan anggota populasi tersebut tidak mempunyai peluang yang sama untuk terpilih menjadi sample. Penentuan sample dilakukan dengan menggunakan rumus Slovin:

$$n = \frac{N}{1+N\alpha^2}$$

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dengan menyebarkan kuesioner yang kemudian akan diisi oleh responden. Sumber data primer pada penelitian ini didapat secara langsung dari wajib pajak orang pribadi yang memiliki usaha dan terdaftar di kota Semarang, melalui kuesioner yang berisi pertanyaan yang bersifat pribadi.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner. Kuesioner ini berisikan daftar pertanyaan yang akan dijawab oleh responden. Responden akan dimintai jawaban dengan sadar dan tanpa paksaan yang sesuai dengan pendapat mereka. Untuk

mengukur jawaban dari responden, peneliti menggunakan skala likert dengan rincian sebagai berikut :

- Angka 1 = Sangat Tidak Setuju (STS)
- Angka 2 = Tidak Setuju (TS)
- Angka 3 = Netral (N)
- Angka 4 = Setuju (S)
- Angka 5 = Sangat Setuju (SS)

3.5 Metode Analisis

Analisis dalam penelitian ini menggunakan Analisis Regresi. Berikut adalah beberapa langkah dalam menganalisis, yaitu :

3.5.1 Statistik Deskriptif

Analisis ini digunakan untuk membantu peneliti merangkum hasil pengamatan penelitian yang telah dilakukan tanpa membuat kesimpulan secara umum dari data yang diperoleh sampel kajian. Statistik deskriptif menurut Ghazali (2011) yaitu mendeskripsikan atau menggambarkan data-data yang hasil pengamatan terhadap kejadian-kejadian atau fenomena-fenomena secara kuantitatif, dengan ciri-ciri sebagai berikut :

1. Variabel-variabel yang akan diteliti dapat dijelaskan dan dideskripsikan. Peneliti dapat menentukan alat ukur yang

digunakan untuk mengukur variabel tersebut sesuai dengan kebutuhan penelitian.

2. Menyusun data dengan nilai terendah hingga nilai tertinggi dan memperkirakan frekuensi yang didapat.
3. Menggunakan teknik statistik deskriptif dengan menggunakan ukuran kecenderungan pusat (*Measures of Central Tendency*), ukuran keberagaman (*Measures of Variability*), yang sesuai dengan skala pengukuran.

3.5.2 Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

Untuk mendapatkan skala pengukuran penelitian yang baik, setiap item kuesioner harus valid dan reliabel. Sugiyono (2005) menyatakan, item kuesioner yang valid adalah item yang digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid. Valid berarti setiap item tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Sedangkan item kuesioner yang reliabilitas adalah item yang apabila digunakan beberapa kali dalam waktu yang berlainan maka akan menghasilkan data yang sama.

3.5.2.1 Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah alat untuk mengukur setiap kuesioner yang merupakan indikator dari variable. Menurut Ghazali (2011) Suatu kuesioner dikatakan reliabel jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan tersebut stabil atau

konsekuen dari waktu ke waktu. Pengukuran ini dapat dilakukan dengan dua cara :

1. Repeated Measure atau pengukuran ulang: seseorang akan diberikan pertanyaan yang sama dengan waktu yang berlainan, kemudian diteliti apakah kuesioner tersebut tetap konsisten dengan jawabannya.
2. One Shot atau pengukuran sekali saja : pengukuran hanya dilakukan sekali dan hasil tersebut akan dibandingkan dengan pertanyaan lain. SPSS memberikan fasilitas untuk mengukur reliabilitas dengan uji statistik Cronbach Alpha ().

3.5.2.2 Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika setiap item pertanyaan pada kuesioner dapat mendeskripsikan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Menurut Ghazali (2011) ada tiga cara untuk mengukur kereliabilitasan kuesioner :

1. Melakukan hubungan korelasi antar nilai per item pertanyaan dengan total nilai variable

2. Melakukan hubungan korelasi bivariate antara masing-masing nilai indikator dengan total nilai variabel.

3.5.3 Uji Asumsi Klasik

3.5.3.1 Uji Normalitas

Pengujian ini dilakukan untuk menguji apakah model regresi yang dilakukan dalam suatu penelitian memiliki residual yang berdistribusi normal.

Seperti diketahui bahwa uji t dan F berasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Jika asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sample kecil. Menurut Ghazali (2011) ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik.

a. Analisis Grafik

Analisis grafik adalah cara termudah untuk melihat normalitas residual dengan melihat grafik histogram yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal. Tetapi, jika hanya melihat dari histogram terkadang peneliti bisa tertipu dengan histogram yang ada. Metode yang lebih handal adalah dengan melihat

normal probability plot yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal, distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal. Jika distribusi data normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya.

b. Analisis Statistik

Jika tidak hati-hati, peneliti dapat tertipu jika uji normalitas dilakukan dengan menggunakan analisis grafik karena secara visual kelihatan normal padahal secara statistik bisa sebaliknya. Oleh sebab itu dianjurkan disamping uji grafik dilengkapi dengan uji statistic. Uji statistic sederhana dapat dilakukan dengan melihat nilai kurtosis dan skewness dari residual. Nilai z statistic untuk skewness dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{Zskewness} = \frac{\text{Skewness}}{\sqrt{6/N}}$$

Sedangkan nilai z kurtosis dapat dihitung dengan rumus :

$$Z_{\text{kurtosis}} = \frac{\text{Kurtosis}}{24/N}$$

Dimana N adalah jumlah sampel, jika nilai Z hitung > Z tabel, maka distribusi tidak normal.

3.5.3.2 Uji Multikolinieritas

Dalam penelitian ini bila ditemukan adanya korelasi antar variabel independen, maka model regresi tersebut terindikasi multikolinieritas. Dalam sebuah penelitian model regresi seharusnya tidak terjadi multikolinieritas. Menurut Ghozali (2011) untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas di dalam model regresi adalah sebagai berikut :

- a. Nilai R Square (R^2) yang dihasilkan oleh perkiraan suatu model regresi empiris sangat tinggi, tetapi secara individual variabel dependen tersebut tidak signifikan dipengaruhi oleh variable-variabel independen.

- b. Menganalisis matrik korelasi variable-variabel independen. Terindikasi adanya multikolinieritas, jika antar variable independen terdapat korelasi yang tinggi (umumnya > 0.90). Tetapi, tidak adanya korelasi yang tinggi antar variable independen bukan berarti model tersebut tidak terindikasi multikolinieritas. Multikolinieritas terjadi disebabkan karena adanya efek kombinasi dua atau lebih variable independen.
- c. Multikolinieritas dapat juga dilihat dari (1) nilai toleransi dan lawannya (2) *variance inflation factor* (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variable independen yang mana yang dapat dijelaskan oleh variable independen lainnya. Toleransi mengukur kevariabilisan variable independen yang terpilih, yang tidak dapat dijelaskan oleh variable independen lainnya. Jadi, nilai toleransi yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena $VIF = 1/\text{Tolerance}$). Nilai cut off yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinieritas adalah nilai Tolerance 0.10 atau sama dengan nilai VIF 10. Setiap peneliti harus

menentukan tingkat kolinieritas yang masih dapat ditolerir.

3.5.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas ini dilakukan untuk menguji apakah model regresi dalam suatu penelitian terjadi ketidaksamaan variasi dari residual pengamatan ke pengamatan lain. Bila variasi dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homokedastisitas dan jika berbeda disebut Heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah model regresi yang tidak terindikasi Homokedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas. Menurut Ghozali (2011) ada beberapa cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas :

- a. Melihat grafik plot antara nilai prediksi variable terikat (dependen) yaitu ZPRED (pada sumbu X) dengan residualnya SRESID (pada sumbu Y). Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED.
- b. Uji Park

Park mengemukakan metode bahwa *variance* (s^2) merupakan fungsi dari variable-variabel independen yang dinyatakan dalam persamaan :

$$s^2 = f(X_i)$$

persamaan ini dijadikan linier dalam bentuk persamaan logaritma sehingga menjadi :

$$\ln s^2_i = \alpha + \beta \ln X_i + v_i$$

Karena s^2_i umumnya tidak diketahui, maka dapat ditaksir dengan menggunakan residual U_t sebagai proksi, sehingga persamaan menjadi :

$$\ln U^2_i = \alpha + \beta \ln X_i + v_i$$

c. Uji Glejser

Seperti halnya Uji Park, Glejser mengusulkan untuk meregres nilai absolute residual terhadap variable independen (Gujarati, 2003) yang diikuti oleh Ghazali (2011) dengan persamaan regresi :

$$|U_t| = \alpha + \beta X_t + v_t$$

d. Uji White

Pada dasarnya Uji white sama dengan kedua Uji Park dan Glejser. Menurut white uji ini dapat dilakukan dengan meregres residual kuadrat (U^2_t)

dengan variable independen, variable dependen kuadrat dan perkalian (interaksi) variable independen. Misalkan ada dua variable independen X_1 dan X_2 , maka persamaan regresinya :

$$U^2_t = b_0 + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_1^2 + b_4X_2^2 + b_5X_1X_2$$

Dari persamaan regresi ini dapatkan nilai R^2 untuk menghitung c^2 , dimana $c^2 = n \times R^2$ (Gujarati, 2003) yang dikutip oleh (Ghozali, 2011). Pengujiannya adalah jika c^2 hitung $< c^2$ tabel, maka hipotesis alternative adanya heteroskedastisitas dalam model ditolak.

3.5.4 Model Regresi

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda yaitu suatu model yang digunakan untuk menganalisis lebih dari satu variable independen. Persamaan regresi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + b_5X_5 + e$$

dengan :

Y = perspektif wajib pajak mengenai penggelapan pajak

a = Konstanta

b_1 = koefisien regresi variable keadilan

b_2 = koefisien regresi variable sistem perpajakan

b_3 = koefisien regresi variable kepatuhan

b_4 = koefisien regresi variable norma

b_5 = koefisien regresi variable diskriminasi

c = konstanta

X_1 = keadilan

X_2 = sistem perpajakan

X_3 = kepatuhan

X_4 = norma

X_5 = diskriminasi

e = error term

3.5.5 Pengujian Hipotesis

Secara statistik, model regresi dapat diukur melalui nilai koefisien determinasi (R^2), nilai statistik t dan nilai statistik F. Apabila nilai uji statistiknya berada di daerah kritis (H_a diterima) maka perhitungan tersebut signifikan. Sebaliknya bila nilai uji

statistiknya berada di daerah (H_a ditolak) maka perhitungannya tidak signifikan.

3.5.5.1 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk menjelaskan varian dari variabel dependen dalam suatu model regresi dengan nilai koefisien determinasi adalah nol dan satu. Jika pada suatu model nilai R^2 kecil atau sedikit, berarti model tersebut dapat menjelaskan variasi dependen terbatas. Sebaliknya, jika nilai R^2 mendekati angka 1 maka model tersebut dapat menjelaskan variabel independen dengan seluruh data yang ada atau informasi yang relevan.

Kelemahan dalam penggunaan koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model. Menurut Ghazali (2011) bila dalam model tersebut menambahkan satu atau lebih variabel independen, maka nilai R^2 akan bertambah. Pada hasil output SPSS nilai adjusted R^2 bisa saja bernilai negative, walaupun yang diinginkan peneliti harus bernilai positif. Menurut Gujarati (2003) yang dikutip oleh Ghazali (2011) jika dalam uji empiris didapat nilai adjusted R^2 negative, maka nilai adjusted R^2 dianggap bernilai nol. Secara sistematis jika nilai $R^2 = 1$, maka adjusted $R^2 = R^2 = 1$ sedangkan jika nilai $R^2 =$

0, maka $\text{adjusted } R^2 = (1-k)/(n-k)$. jika $k > 1$, maka $\text{adjusted } R^2$ akan bernilai negatif.

3.5.5.2 Uji t

Uji statistik t digunakan untuk mengukur seberapa besar pengaruh variabel independen dalam menerangkan variasi variabel dependen. Hipotesis nol (H_0) yang hendak diuji adalah apakah suatu parameter (β_i) sama dengan nol. Menurut Ghozali (2011) cara melakukan uji t adalah sebagai berikut :

- Quick look : bila jumlah *degree of freedom* (df) adalah 20 atau lebih dan derajat kepercayaan sebesar 5%, maka H_0 yang menyatakan $\beta_i = 0$ dapat ditolak bila nilai t lebih besar dari 2 (dua). Dengan kata lain kita menerima hipotesis alternatif, yang menyatakan bahwa suatu variable independen secara individual mempengaruhi variable dependen.
- Membandingkan nilai statistik t dengan titik kritis menurut tabel. Apabila nilai statistik t hasil perhitungan lebih tinggi dibandingkan nilai t tabel, kita menerima hipotesis alternatif yang menyatakan

bahwa suatu variable independen secara individual mempengaruhi variable dependen.

3.5.5.3 Uji F

Uji statistik F digunakan untuk mengetahui apakah model yang terdiri dari semua variabel independen mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Menurut (Ghozali, 2011) untuk menguji hipotesis ini digunakan statistik F dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut :

- Quick look : bila nilai F lebih besar daripada 4 (empat) maka H_0 dapat ditolak pada derajat kepercayaan 5%. Dengan kata lain, kita menerima hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa semua variable independen secara serentak dan signifikan mempengaruhi variable dependen.
- Membandingkan nilai F hasil perhitungan dengan nilai F menurut tabel. Bila nilai F hitung lebih besar daripada nilai F tabel, maka H_0 ditolak dan menerima H_a .